

IMPLIKASI RPJMN 2010-2014 SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

IMPLICATION OF RPJMN 2010-2014 IN EDUCATIONAL SECTOR TO MANAGEMENT CURRICULUM DEVELOPMENT OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION

Herry Widyastono

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemdikbud

Jl. Gunung Sahari IV - Jakarta Pusat

Email: herrywidyastono@yahoo.com

Diterima tanggal: 19/06/2012, Dikembalikan untuk revisi tanggal: 02/07/2012, Disetujui tanggal: 29/08/2012

Abstrak: Tujuan penulisan untuk menyusun rencana strategi pengembangan kurikulum nasional, daerah, dan satuan pendidikan sesuai amanah RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan. Hasil kajian menyimpulkan: a) Secara umum dibedakan antara manajemen pengembangan kurikulum terpusat (sentralistik), tersebar (desentralistik), dan sentral-desentral; b) KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan manajemen pengembangan kurikulum sentral-desentral; c) Pada umumnya guru hanya mengadaptasi bahkan mengadopsi KTSP dari satuan pendidikan lain yang belum tentu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya; d) Pemberian kewenangan lebih baik berjenjang, mulai dari kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar unit-unit kerja terkait, melakukan: a) penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penataan Kurikulum Nasional, Daerah, dan Sekolah; b) sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan di tingkat pusat dan daerah; c) bantuan profesional pengembangan kurikulum dan pembinaan teknis kepada para penyelenggara pendidikan; d) pelatihan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan; dan e) penyiapan dan penggantian seluruh sarana pembelajaran yang diperlukan.

Kata Kunci: strategi manajemen kurikulum nasional, kurikulum daerah, standar nasional pendidikan, dan kurikulum satuan pendidikan.

Abstract: The goal of writing this article is to set a management strategy of national curriculum development, regional curriculum, and school curriculum in accordance with RPJMN 2010-2014 education sector. The results of the study are as follows: a) In general, distinguished between centralized curriculum development management (centralized), spread (decentralized), and central-decentralized; b) KTSP is the operational curriculum developed by and implemented in each school, with reference to the National Education Standards. So the KTSP is the central - decentralized management of curriculum development, c) In general, teachers are adapting even adopt KTSP from other schools that do not necessarily correspond to the characteristics of their schools, d) The authorization better tiered, ranging from the authority of the central government, provincial, district/city governments, and schools. Based on these conclusions, it is recommended that the relevant work units, in accordance with the duties and functions, shall: a) preparing and determining the Regulation of Minister of Education and Culture on the National Curriculum Arrangement, District, and School, as well as all the conflicting rules regarding curriculum revoked and is no longer valid; b) socialization to all education stakeholders at national and regional levels, c) giving technical and professional training on curriculum development, d) giving training for educators and education personnel, and (e) prepare and copying all the necessary learning tool.

Keywords: management strategy national curriculum, regional curriculum, national standard of education, and school curriculum

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tidak dikenal lagi istilah kurikulum nasional, yang ada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk mengembangkan sendiri KTSP, termasuk di dalamnya adalah silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan satuan pendidikan (visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan), potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik (kemampuan dan karakteristiknya), dengan mengacu pada SI dan SKL. Setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan sendiri KTSP, mengadaptasi, maupun mengadopsi KTSP yang dikembangkan oleh satuan pendidikan lainnya. Diharapkan, semakin lama semakin banyak satuan pendidikan yang mampu mengembangkan sendiri KTSP.

Tetapi kenyataannya, setelah berjalan selama sekitar 6 tahun, hasil studi Widyastono (2012a) menunjukkan tidak lebih dari 10% satuan pendidikan yang mengembangkan sendiri KTSP, sedangkan sebagian besar (sekitar 90%) hanya mengadaptasi bahkan mengadopsi KTSP dari satuan pendidikan lainnya. Padahal KTSP yang diadaptasi/diadopsi belum tentu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan (visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan), potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didiknya (kemampuan dan karakteristiknya).

Selain itu, hasil penelitian Widyastono (2012b) juga menyimpulkan bahwa kemampuan awal guru-guru IPA dan Matematika SD, SMP, dan SMA di DKI, Bekasi, dan Tangerang dalam menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), diperoleh kesimpulan bahwa sekitar 90% guru dalam menjabarkan kompetensi dasar (KD) menjadi indikator kurang tepat; dalam merumuskan kegiatan belajar belum mengaktifkan peserta didik untuk eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi; serta penilaiannya semata-mata hanya mengukur aspek kognitif saja.

Hal ini dapat dimaklumi karena para guru ketika masih kuliah di perguruan tinggi (sebelum tahun 2006) tidak diajar tentang bagaimana mengembangkan kurikulum sendiri, melainkan hanya dibekali dengan bagaimana mengimplementasikan kurikulum (Garis-garis Besar Program Pengajaran, identik dengan silabus) yang sudah disusun oleh Pemerintah Pusat. Dengan memberi kewenangan kepada setiap satuan pendidikan untuk menyusun KTSP memang sangat ideal, karena yang paling memahami kemampuan setiap peserta didik adalah guru sehingga yang paling ideal menyusun KTSP adalah guru yang bersangkutan. Tetapi, sayangnya guru-guru di lapangan belum dipersiapkan secara matang, sehingga pada umumnya belum siap menerima pelimpahan kewenangan yang sangat drastis, dari Pemerintah Pusat langsung kepada satuan pendidikan/guru, bukan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Sebagai akibatnya pada umumnya guru hanya mengadaptasi bahkan mengadopsi KTSP dari satuan pendidikan lain, yang belum tentu sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan penataan ulang kurikulum, sesuai amanah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sektor pendidikan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan dinyatakan bahwa dalam rangka peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat, pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan; dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Sehubungan dengan hal itu terdapat 6 substansi inti program aksi sektor pendidikan, 2 di antaranya adalah Butir 3, Metodologi, yaitu penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa

Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasarmenengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014; dan Butir 5, Kurikulum, penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah, sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (di antaranya dengan mengembangkan model *link and match*).

Berkenaan dengan hal-hal di atas, yang menjadi permasalahan tulisan ini adalah bagaimana implikasi RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan terhadap manajemen pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah? Sedangkan tujuan penulisan adalah untuk menyusun strategi manajemen pengembangan kurikulum nasional, daerah, dan satuan pendidikan sesuai amanah RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pengambil keputusan dalam rangka menetapkan kurikulum nasional, daerah, dan satuan pendidikan.

Kajian Literatur dan Pembahasan

Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Sisdiknas, 2003).

Kurikulum dapat dilihat dalam tiga dimensi (Syaodih, 2007) yaitu, sebagai ilmu (*curriculum as a body of knowledge*), sebagai sistem (*curriculum as a system*) dan sebagai rencana (*curriculum as a plan*). Dalam kurikulum sebagai ilmu, dikaji konsep, landasan, asumsi, teori, model, praksis, prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Dalam kurikulum sebagai sistem, dijelaskan kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem dan bidang-bidang lain, komponen-komponen kurikulum, kurikulum berbagai jalur, jenjang, jenis pendidikan, manajemen kurikulum, dan sebagainya. Dalam kurikulum sebagai rencana, tercakup macam-macam rencana dan rancangan

atau desain kurikulum. Kurikulum sebagai rencana ada yang bersifat menyeluruh untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan ada pula yang khusus untuk jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Kurikulum sebagai rencana merupakan dimensi kurikulum yang paling banyak dikenal dan diketahui orang, baik oleh para pelaksana kurikulum (guru dan pimpinan satuan pendidikan) maupun masyarakat terutama orang tua. Kurikulum inilah yang dikembangkan oleh guru-guru dalam KTSP. Kurikulum sebagai rencana (*a plan of action*) atau disebut juga kurikulum tertulis (*written curriculum*) atau kurikulum sebagai dokumen (*document curriculum*) menjadi acuan, pedoman atau pegangan bagi guru-guru dan para pelaksana kurikulum lainnya dalam implementasi kurikulum. Sebagai suatu acuan atau pedoman, kurikulum berbentuk dokumen tertulis yang sering juga disebut sebagai kurikulum formal (*formal curriculum*) atau kurikulum lembaga (*official curriculum*). Berpegang pada kurikulum tertulis tersebut, oleh karenanya dilaksanakan kurikulum perbuatan (*curriculum in action*), implementasi kurikulum (*curriculum implementation*), mencakup apa yang terjadi di kelas dan di luar kelas (*actual atau activity curriculum*), baik yang dikerjakan oleh guru maupun peserta didik (*experiential curriculum*).

Sebagai dokumen tertulis kurikulum tidak hanya terdiri atas mata pelajaran (*course of study*), atau uraian isi mata pelajaran (*course content*) atau persiapan mengajar (*teaching preparation*) dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (*sillaby and lesson unit*), tetapi mencakup semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan rencana pembelajaran. Kurikulum tertulis selain mencakup hal-hal di atas, juga meliputi landasan dan azas-azas pengembangan kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pedoman-pedoman pelaksanaan seperti pedoman: pembelajaran, penilaian, pengelolaan, bimbingan, dan evaluasi; media dan sumber pembelajaran seperti: media elektronik dan non elektronik; buku, modul dan *handout*; program-program pembelajaran seperti pembelajaran melalui: komputer, film, video, dan audio.

Implementasi kurikulum atau kurikulum sebagai aktivitas atau kurikulum sebagai pengalaman, mencakup proses belajar-mengajar yang berlangsung di kelas, laboratorium, workshop/bengkel, studio, perpustakaan, dan di lapangan (kegiatan kurikuler) maupun kegiatan ko- dan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di sekolah dan luar sekolah. Memang beberapa waktu yang lalu banyak yang mengartikan kurikulum secara sempit, yaitu hanya mencakup kegiatan kurikuler, atau dokumen tertulis, atau malahan hanya kumpulan dari mata-mata pelajaran. Dewasa ini kurikulum diartikan lebih luas, yaitu sebagai semua rancangan yang berfungsi mengoptimalkan perkembangan peserta didik, dan semua pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik berkat arahan, bimbingan, dan dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan.

Kurikulum merupakan inti dari pendidikan, sebab selain berisi rumusan tentang kompetensi yang menentukan ke mana peserta didik akan dibawa dan diarahkan, juga berisi rumusan tentang isi dan kegiatan belajar, yang akan membekali peserta didik dengan pengetahuan, kecakapan, keterampilan serta nilai-nilai yang mereka perlukan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas pekerjaan di masa yang akan datang. Kurikulum memberikan dasar-dasar bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan profesional, yang akan menentukan kualitas insan dan sumber daya manusia suatu bangsa.

Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum berkenaan dengan bagaimana kurikulum dirancang, diimplementasikan (dilaksanakan), dan dikendalikan (dievaluasi dan disempurnakan), oleh siapa, kapan, dalam lingkup mana, dan seterusnya. Manajemen kurikulum juga menyangkut kebijakan: siapa yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan dan mengendalikan kurikulum. Dari sudut siapa yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan kurikulum, secara umum dibedakan antara manajemen pengembangan kurikulum terpusat (*centralized curriculum development management atau top down curriculum development*) dan manajemen

pengembangan kurikulum tersebar (*decentralized curriculum development management atau bottom up curriculum development*). Kemp dalam Brady (1990) melihat pendekatan pengembangan kurikulum tersebut dalam suatu kontinum.

At one extreme is center-based or top down curriculum development in which the curriculum is determined by the centre, and there is little autonomy for schools. At the other extreme is the bottom-up or school-based curriculum, developed entirely by individual schools.

Pendapat Kemp tersebut menegaskan bahwa kurikulum (*desain kurikulum*) dapat bervariasi mulai dari yang sepenuhnya standar (seluruh komponen dirumuskan secara tuntas oleh pusat), sebagian besar komponen (komponen dasar dan komponen utama), sebagian komponen dirumuskan oleh tim pusat, sedang komponen lainnya (penjabarannya) dikembangkan oleh daerah (provinsi atau kabupaten/kota) atau oleh satuan pendidikan, sampai dengan yang seluruh komponennya dikembangkan oleh satuan pendidikan.

Kurikulum yang seluruh komponennya dikembangkan oleh pusat pengelolaannya sepenuhnya sentralistik, yang seluruh komponennya dikembangkan oleh daerah atau satuan pendidikan pengelolaannya sepenuhnya desentralistik, dan yang sebagian komponen dirumuskan oleh pusat, sebagian oleh daerah, dan sebagian lainnya oleh satuan pendidikan terletak di antaranya, atau sentral-desentral. Manajemen sentral-desentral inipun masih bervariasi pula, lebih berat ke arah sentralisasi atau desentralisasi, atau seimbang antara keduanya.

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, KTSP pengelolaan sebenarnya sentral-desentral. Sentral karena mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional; sedangkan desentral karena disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dokumen I KTSP disusun oleh satuan pendidikan, yang bertanggung jawab Kepala satuan pendidikan;

dokumen II KTSP (Silabus) disusun oleh guru secara perseorangan atau kelompok; Dokumen III KTSP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) disusun oleh guru secara perseorangan. Semua dokumen harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Manajemen pengembangan kurikulum sentralistik

Pada negara yang bersifat kesatuan seperti Indonesia, sentralisasi ini berada pada tingkat pemerintah pusat, sedang pada negara federal sentralisasi dapat pada tingkat pemerintah federal (pusat) atau tingkat negara bagian. Dalam manajemen pengembangan kurikulum yang terpusat atau sentralistik, selain tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengembangan kurikulum dipegang oleh pejabat pusat, juga inisiatif, gagasan, bahkan model kurikulum yang akan dikembangkan dapat berasal dari pemegang kekuasaan di pusat. Manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional, satu kurikulum yang berlaku di seluruh wilayah negara. Dalam manajemen kurikulum sentralistik, mungkin seluruh perangkat kurikulum, mulai dari landasan atau kerangka dasar kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya disusun oleh pusat. Dalam manajemen sentralistik, mungkin juga yang disusun oleh pusat hanya landasan atau kerangka dasar kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, sedangkan penjabarannya lebih lanjut dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan oleh daerah atau satuan pendidikan.

Manajemen kurikulum sentralistik memiliki beberapa kelebihan di samping kelemahan. Kelebihannya yaitu: 1) kurikulum seragam untuk seluruh daerah dan sekolah, dapat dikembangkan standar kemampuan dan tingkat pencapaian yang bersifat nasional; 2) karena kurikulumnya seragam, maka lebih mudah dalam pengendalian atau pengawasan dan evaluasinya; 3) pembinaan para pelaksana kurikulum lebih mudah karena pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan hampir sama, 4) penyediaan media dan sumber belajar lebih mudah karena jenisnya sama untuk setiap daerah dan satuan

pendidikan, 5) memungkinkan diadakan penilaian hasil belajar yang bersifat nasional, karena desain atau rancangan kurikulum dan sasaran belajarnya sama untuk seluruh daerah dan satuan pendidikan.

Manajemen kurikulum sentralistik juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya: 1) wilayah yang cukup luas memiliki keragaman dalam kondisi, kebutuhan dan tingkat kemajuannya, sehingga kurikulum yang bersifat nasional tidak dapat mengakomodasi keragaman kondisi tersebut; 2) pemahaman dan penguasaan kurikulum nasional oleh para pelaksana di seluruh wilayah tanah air membutuhkan waktu yang relatif lebih lama; 3) penerapan satu jenis kurikulum untuk wilayah yang cukup luas dapat menghadapi banyak hambatan dan kemungkinan penyimpangan.

Manajemen pengembangan kurikulum desentralistik

Dalam manajemen kurikulum desentralistik, penyusunan desain, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum (evaluasi dan penyempurnaan), dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan. Penyusunan desain kurikulum dilakukan oleh guru-guru, melibatkan ahli, komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain di masyarakat, yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum. Pengembangan kurikulum demikian disebut pengembangan kurikulum berbasis sekolah (*School based curriculum development* atau *SBCD*), yang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Dalam SBCD atau KTSP pengembangan kurikulum dapat mencakup seluruh komponen kurikulum atau hanya sebagian komponen saja. Penyusunannya dapat dilakukan hanya oleh seorang, sekelompok atau seluruh guru dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan/program satuan pendidikan dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan masyarakat sekitarnya.

Dalam pengembangan KTSP, desain kurikulum yang meliputi sasaran atau tujuan kurikulum, materi atau isi kurikulum, model pembelajaran dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan

kebutuhan, tantangan, karakteristik, dan tahap perkembangan sekolah dan masyarakat dimana sekolah berada. Kurikulum dapat lebih bermakna, karena bertolak dari situasi dan kondisi setempat dan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan setempat. Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan akan menghasilkan desain kurikulum yang beragam, tetapi lebih mudah difahami, dikuasai dan dilaksanakan oleh guru, sebab mereka sendiri yang mengembangkannya, minimal ikut serta dalam pengembangannya.

Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya, yaitu: 1) kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, dan perkembangan satuan pendidikan dan masyarakat setempat, sehingga satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung dapat membantu perkembangan masyarakat; 2) lebih mudah dilaksanakan karena desain kurikulum disusun oleh guru-guru sendiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung pelaksanaannya yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar.

Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan juga memiliki kelemahan, di antaranya: 1) tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan dalam pengembangan kurikulum, atau tidak semua satuan pendidikan/daerah memiliki guru atau orang yang ahli atau cakap dalam pengembangan kurikulum; 2) kurikulum bersifat lokal, lulusannya kurang memiliki kemampuan atau daya saing secara nasional; 3) desain kurikulum sangat beragam, dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum serta evaluasi hasil belajar secara nasional; 4) perpindahan peserta didik dari satu sekolah atau daerah ke sekolah atau daerah lain dapat menimbulkan kesulitan.

Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan memiliki beberapa variasi, Patrick. (1995) menggambarkan variasi tersebut dalam sebuah diagram yang menggambarkan keterlibatan guru-guru dalam kegiatan pengembangan kurikulum.

Kreasi, kurikulum yang dikembangkan merupakan desain kurikulum baru yang berbeda dari kurikulum yang ada. Adaptasi, kurikulum baru merupakan adaptasi atau modifikasi dari kurikulum yang ada. Seleksi atau pemilihan, kurikulum baru merupakan hasil pemilihan dari kurikulum-kurikulum yang ada di daerah atau sekolah lain, diambil tanpa perubahan atau penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Pada sisi keterlibatan staf atau pelaksana kurikulum, penyusunan kurikulum bervariasi mulai dari melibatkan seluruh staf atau pelaksana kurikulum di sekolah, oleh kelompok atau tim khusus, oleh individu (perseorangan) dengan acuan atau kriteria tertentu, sampai pada pilihan oleh individu tanpa acuan atau kriteria sama sekali. Penyusunan kurikulum satuan pendidikan yang paling baik adalah yang bersifat kreasi dan melibatkan seluruh staf (pada diagram terletak pada kotak sudut kanan-atas), dan yang paling kurang baik adalah pemilihan hanya oleh individu, kepala sekolah, atau seorang guru (kotak sudut kiri bawah).

Strategi Manajemen Pengembangan Kurikulum Nasional, Daerah, dan Satuan Pendidikan

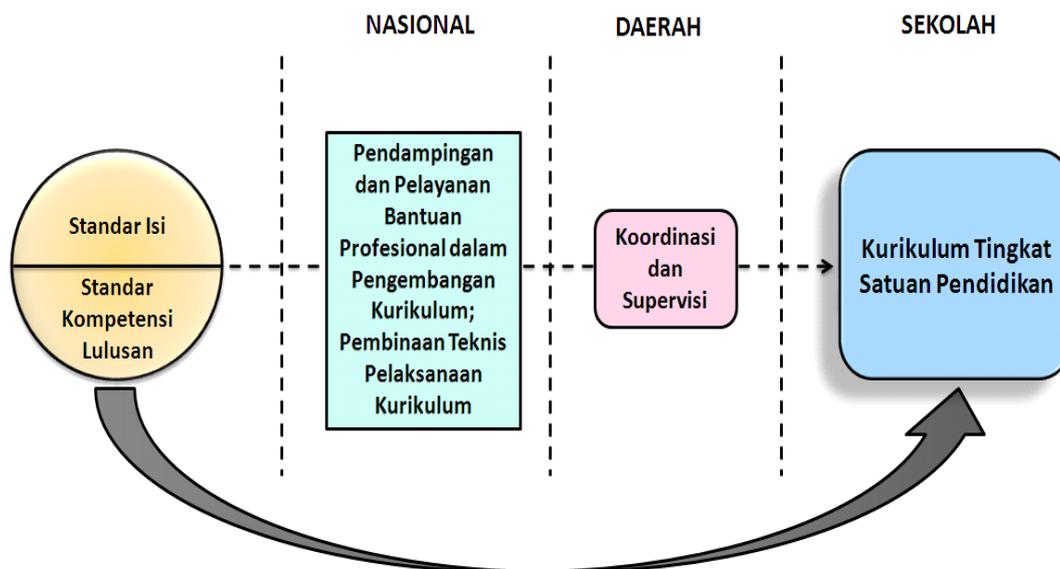
Memberi kewenangan langsung kepada setiap satuan pendidikan untuk menyusun KTSP memang sangat ideal, karena yang memahami kemampuan setiap peserta didik adalah guru sehingga yang paling ideal menyusun KTSP adalah guru yang bersangkutan. Tetapi, sayangnya guru-guru di lapangan belum dipersiapkan secara

CARA	PELAKSANA			
	Perseorangan	Perseorangan dengan acuan	Kelompok	Seluruh Staf
Kreasi				+
Adaptasi				
Seleksi	-			

Bagan 1. Kemungkinan Variasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

matang, sehingga pada umumnya belum siap menerima pelimpahan kewenangan yang sangat drastis, dari Pemerintah Pusat langsung kepada satuan pendidikan/guru, bukan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota (lihat Bagan 2). Sebagai akibatnya pada umumnya guru hanya mengadaptasi bahkan

pengembangan kurikulum pada tingkat nasional mencakup: kerangka dasar dan struktur kurikulum; pengembangan silabus dan buku teks pelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Matematika, dengan mengacu pada tingkat kompetensi yang



Bagan 2. Konstelasi kurikulum sejak tahun 2006 (Sumantrie, 2012)

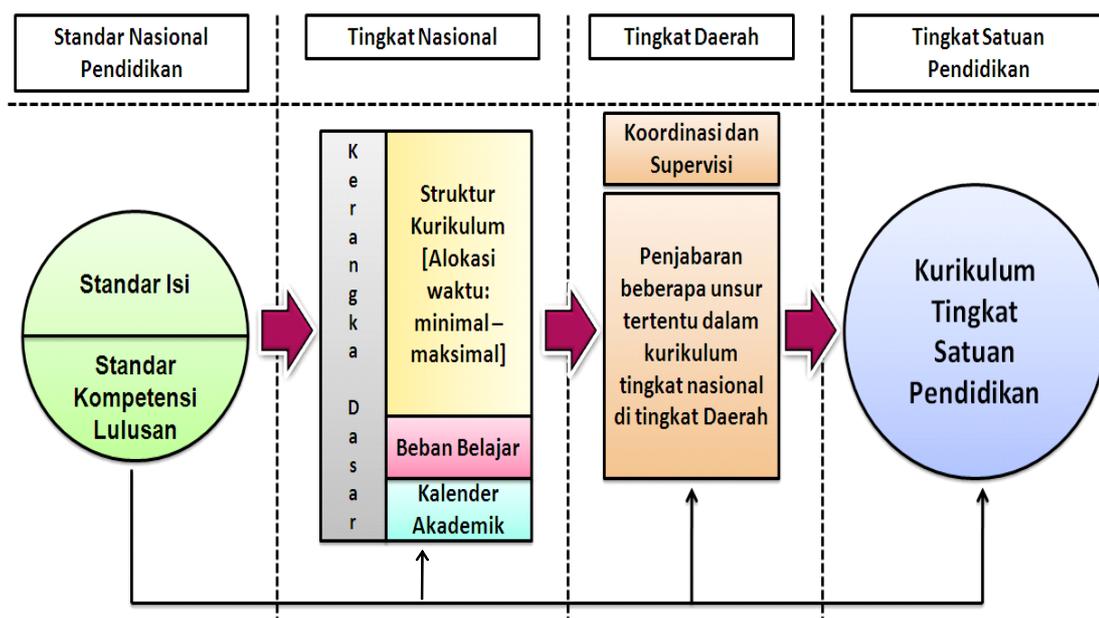
mengadopsi KTSP dari satuan pendidikan lain yang belum tentu benar. Selain itu, dapat pula berakibat keutuhan NKRI dapat terganggu, dan kurikulum disisipi dengan ajaran-ajaran sesat apabila tidak ada tim yang melakukan verifikasi.

Menyadari hal ini, maka pemberian kewenangan lebih baik secara berjenjang, mulai dari kewenangan Pemerintah Pusat (nasional), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Dalam manajemen pengembangan kurikulum nasional, daerah, dan sekolah terdapat pembagian kewenangan mulai dari Pemerintah Pusat (nasional), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan, sehingga sebenarnya dapat disebut dengan istilah kurikulum sentral-desentral. Ada komponen-komponen yang disentralistikan di tingkat nasional, ada pula komponen-komponen yang didesentralistikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan (lihat Bagan 3), sebagai berikut: a) Manajemen

ditetapkan oleh pemerintah pusat; b) Manajemen pengembangan kurikulum pada tingkat provinsi mencakup: pengembangan silabus untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya dengan mengacu pada tingkat kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan pengembangan silabus untuk mata pelajaran Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/Kejuruan dengan mengacu pada tingkat kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; c) Manajemen pengembangan kurikulum pada tingkat kabupaten/kota mencakup: pengembangan silabus Muatan Lokal dengan mengacu pada kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; serta melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pengembangan Muatan Lokal mengacu pada pedoman yang disusun oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan; dan d) Manajemen pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pada tingkat sekolah diwujudkan dalam bentuk kurikulum operasional sekolah yang dilengkapi dengan: silabus yang disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru; program pengembangan diri; dan kalender akademik

kurikulum. Secara umum dibedakan antara manajemen pengembangan kurikulum terpusat (sentralistik), manajemen pengembangan kurikulum tersebar (desentralistik), dan manajemen pengembangan kurikulum sentral-desentral; b) KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan, sehingga KTSP



Bagan 3. Manajemen pengembangan kurikulum nasional, daerah, dan satuan pendidikan

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum operasional sekolah.

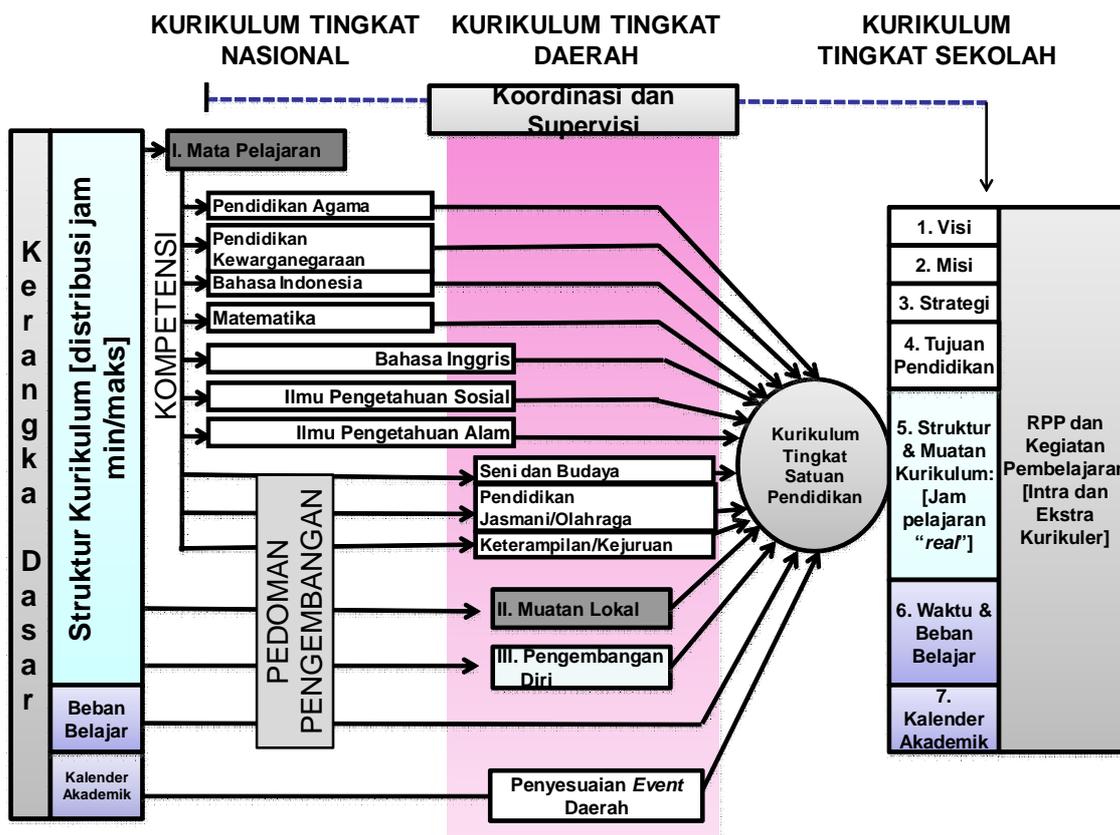
Strategi manajemen pengembangan kurikulum nasional, daerah, dan satuan pendidikan (sentral-desentral) seperti Bagan 4.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasar pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut. a) Manajemen kurikulum berkenaan dengan: bagaimana kurikulum dirancang, diimplementasikan, dievaluasi, dan disempurnakan: oleh siapa, kapan, dalam lingkup mana, dan seterusnya. Manajemen kurikulum juga menyangkut kebijakan: siapa yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengendalikan

merupakan manajemen pengembangan kurikulum sentral-desentral. Sentral karena mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional; desentral karena disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan; c) Memberi kewenangan langsung kepada setiap satuan pendidikan untuk menyusun KTSP memang ideal, karena yang memahami kemampuan setiap peserta didik adalah guru, sehingga yang paling ideal menyusun KTSP adalah guru yang bersangkutan. Tetapi, guru-guru di lapangan belum dipersiapkan secara matang, sehingga pada umumnya belum siap menerima pelimpahan kewenangan langsung dari pemerintah pusat, akibatnya pada umumnya guru hanya mengadaptasi bahkan mengadopsi KTSP dari satuan pendidikan lain yang belum tentu



Bagan 4. Strategi Manajemen Pengembangan Kurikulum Nasional, Daerah, dan Satuan Pendidikan (Sumantrie, 2012)

sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya. Selain itu, dapat pula berakibat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terganggu, dan kurikulum disisipi dengan ajaran-ajaran sesat apabila tidak ada tim yang melakukan verifikasi; d) Pemberian kewenangan lebih baik berjenjang, mulai dari kewenangan Pemerintah Pusat (nasional), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Ada komponen-komponen pendidikan yang desentralistikan di tingkat nasional, ada pula komponen-komponen yang didesentralistikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Dengan demikian, manajemen pengembangan kurikulumnya sentral-desentral berjenjang, mulai dari kewenangan Pemerintah Pusat (nasional), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Saran

Sebelum strategi manajemen pengembangan kurikulum nasional, daerah, dan satuan pendidikan dasar dan menengah diberlakukan secara nasional, unit-unit kerja terkait, perlu melakukan kegiatan: a) penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penataan Kurikulum Nasional, Daerah, dan Sekolah, serta segala peraturan mengenai kurikulum yang bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; b) sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan kementerian yang mempunyai tanggung jawab di bidang pendidikan, dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah kementerian agama, serta dinas pendidikan dan kantor kementerian agama kabupaten/kota; c) bantuan profesional pengembangan kurikulum kepada para penyelenggara pendidikan; d) pembinaan teknis pelaksanaan kurikulum kepada para penyelenggara pendidikan; e) pelatihan bagi para pendidik dan tenaga

kependidikan; f) penyusunan pedoman-pedoman; g) penyiapan dan penggandaan seluruh sarana pembelajaran yang diperlukan seperti buku teks pelajaran dan alat-alat bantu pembelajaran; dan h) perintisan pelaksanaan kurikulum secara

terbatas pada satuan pendidikan dengan memberdayakan seluruh sumber daya pendidikan yang sudah tersedia di satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pustaka Acuan

- Brady, Laurie. 1990. *Curriculum Development*. New York: Prentice Hall.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Slattery, Patrick. 1995. *Curriculum Development in the Postmodern Era*. New York: Garland Publishing, Inc.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Landasan Teori dan Inovasi dalam KTSP: Teori, Inovasi, dan Operasionalisasi*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Sumantrie, Hermana. 2012. *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Widyastono, Herry. 2012a. *Studi kasus penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD, SMP, dan SMA DKI, Bekasi, dan Tangerang*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indraprasta.
- Widyastono, Herry. 2012b. *Kemampuan awal guru-guru IPA dan Matematika SD, SMP, dan SMA di DKI, Bekasi, dan Tangerang dalam menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indraprasta.